



PERLOMBAAN PERAHU NAGA DI LIANJIANG, TIONGKOK

Foto udara menunjukkan para kontestan dalam perlombaan perahu naga di pelabuhan perikanan di Kab. Lianjiang, Prov. Fujian, Tiongkok tenggara, Selasa (11/6). Acara yang berlangsung delapan hari ini telah menjadi kegiatan budaya untuk merayakan Festival Perahu Naga yang disebut juga Festival Duanwu.

Putranya Divonis Bersalah, Biden Tegaskan Tak Akan Beri Pengampunan

Sebelum putusan, presiden Joe Biden mengatakan ia tidak akan memberikan pengampunan khusus yang menjadi hak presiden jika Hunter terbukti bersalah.

WASHINGTON (IM) - Hunter Biden menjadi anak presiden Amerika Serikat pertama yang divonis bersalah dalam kasus pidana setelah menjalani sidang dalam pengadilan federal terkait senjata api, Selasa (11/06) waktu setempat. Panel juri yang terdiri dari 12 orang di Pengadilan Delaware mencapai keputusan mereka setelah sekitar tiga jam bermusyawarah.

Sebelumnya, jaksa penuntut mengatakan pria 54 tahun itu berbohong tentang penggunaan narkoba saat mengisi formulir pembelian pistol pada 2018. Hunter Biden mengaku tidak bersalah seraya mengklaim bahwa ia sedang berada dalam tahap pemulihan dari kecanduan narkoba pada saat itu sehingga dirinya tidak berbohong pada formulir pembelian senjata api.

Hunter tidak menunjukkan emosi apa pun saat dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia menatap ke depan dengan tangan terlipat, kemudian berbalik badan guna memeluk beberapa rekan di tim hukumnya. Hunter menghadapi dua dakwaan terkait kebohongan tentang penggunaan narkoba pada pemeriksaan latar belakang sebelum membeli senjata api, serta satu

dakwaannya karena memiliki senjata saat menggunakan narkoba.

Setelah sidang selesai, ia mencium dan memeluk istrinya lalu keluar dari ruangan dengan dikawal oleh agen Dinas Rahasia yang bertugas mengamankan presiden dan keluarga presiden. Hunter Biden menyatakan bahwa dirinya "kecewa dengan vonis pengadilan. Namun dibalik itu kata Hunter, ia bersyukur atas cinta dan dukungan yang dia terima dari istrinya dan teman-temannya.

Beberapa anggota keluarga Biden telah mendukungnya selama persidangan. Namun, hanya dua orang yang hadir saat vonis bersalah dijatuhkan: istrinya, Melissa Cohen Biden; dan pamannya yang merupakan adik kandung Presiden AS Joe Biden, James Biden.

Ibu Negara AS, Jill Biden, tiba di lobi pengadilan beberapa menit setelah putusan dibacakan. Dia kemudian meninggalkan gedung pengadilan bersama anak tirinya melewati kerumunan fotografer dan jurnalis.

Sejumlah ahli hukum mengatakan ada kemungkinan Hunter Biden akan menghadapi hukuman penjara - meskipun sangat tipis kemungkinan Hunter menerima

hukuman maksimal 25 tahun.

Hakim belum menetapkan tanggal untuk vonis hukuman. Namun, vonis hukuman biasanya akan dijatuhkan dalam waktu 120 hari sejak vonis bersalah dijatuhkan. Abbe Lowell, pengacara Hunter Biden, mengatakan bahwa ia akan "dengan gigitan memperjuangkan semua banding yang tersedia bagi Hunter".

Berbicara setelah vonis dijatuhkan, pengacara khusus David Weiss yang terlibat dalam investigasi terhadap Hunter Biden mengatakan bahwa kasus tersebut bukan tentang kecanduan, tetapi tentang "pilihan ilegal yang dibuat terdakwa" saat kecanduan narkoba. "Tidak seorang pun di negara ini yang kebal hukum," kata Weiss. "Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, bahkan terdakwa ini."

"Namun, Hunter Biden seharusnya tidak lebih bertanggung jawab daripada warga negara lain yang dihukum karena tindakan yang sama," tambahnya.

Sementara itu, Presiden Joe Biden berpidato dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih di Washington DC. Presiden mengatakan bahwa ia "sangat bangga" kepada putranya atas upayanya mengalahkan kecanduan narkoba.

"Begitu banyak keluarga yang memiliki orang terkasih yang berjuang melawan kecanduan memahami perasaan bangga melihat seseorang yang Anda cintai berhasil melewati masa sulit dan menjadi begitu kuat dan tangguh

dalam pemulihan," katanya.

Sebelum putusan, presiden mengatakan ia tidak akan memberikan pengampunan khusus yang menjadi hak presiden jika Hunter terbukti bersalah. "Saya akan menerima hasil kasus ini dan akan terus menghormati proses peradilan saat Hunter mempertimbangkan banding," tambah Biden. Bagaimana latar belakang kasus ini?

Ketiga dakwaan terhadap Hunter Biden terkait dengan pembelian pistol revolver Colt Cobra Special olehnya di sebuah toko senjata di Delaware pada Oktober 2018. Senjata api itu disimpannya selama sekitar 11 hari.

Senjata itu kemudian ditemukan di dalam truk oleh pacarnya saat itu, Hallie Biden - janda dari saudara laki-lakinya, Beau. Oleh Hallie, pistol tersebut dibuang di tempat sampah di luar sebuah toko.

Hunter Biden telah berterus terang tentang "kecanduannya yang parah" terhadap kokain, termasuk dalam memoarnya. Para juri juga mendengar kesaksian dari mantan istrinya, Kathleen Buhle, dan mantan pacarnya, Zoe Kestan, yang memaparkan pesta kokain yang digelar Hunter di hotel-hotel mewah di AS.

Apa hubungan kasus Hunter Biden dengan Pilpres AS?

Vonis terhadap Hunter Biden dijatuhkan pada saat yang mengganggakan bagi ayahnya, yang tengah bersaing ketat dengan Donald Trump menjelang Pemilihan Presiden AS, November mendatang.

Trump, mantan presiden AS yang bulan lalu dinyatakan bersalah karena memalsukan dokumen bisnis di Kota New York, menolak segala anggapan bahwa persidangan putra dari lawan politiknya menunjukkan sistem peradilan AS tidak memihak secara politik.

"Persidangan ini tidak lebih dari sekadar pengalihan perhatian dari kejahatan sebenarnya dari keluarga kriminal Biden," kata juru bicara kampanye Trump, Karoline Leavitt, dalam sebuah pernyataan.

Namun, vonis tersebut disambut baik oleh sejumlah pejabat Partai Republik yang mewawancarai Hunter Biden sebagai bagian dari penyelidikan pemakzulan terhadap ayahnya. "Putusan hari ini merupakan langkah menuju akuntabilitas," kata Ketua Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR AS, James Comer, dalam sebuah unggahan di X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Di pengadilan, baik pengacara Hunter Biden maupun jaksa penuntut berulang kali memberi tahu para juri bahwa keluarga Biden tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap keputusan mereka, meskipun ibu negara dan petugas Dinas Rahasia terlihat jelas dari boks juri.

Berbicara kepada BBC beberapa jam setelah putusan, salah satu juri - yang dikenal sebagai anggota nomor 10 - mengatakan bahwa ia dan juri lainnya mencamkan pesan tersebut dalam hati. ● tom

Rusia Berhenti Rekrut Tentara dari Sri Lanka

MOSKOW (IM) - Pemerintah Rusia setuju untuk tidak lagi melanjutkan praktek perekrutan tentara yang berasal dari Sri Lanka. Kementerian Luar Negeri Sri Lanka pada Rabu (12/6) mengatakan, keputusan itu diambil selama pertemuan Menteri Luar Negeri Sri Lanka Ali Sabry dan rekannya dari Rusia Sergei Lavrov di sela-sela pertemuan tingkat menteri BRICS di Moskow hari Senin (10/6). "Atas permintaan Menteri Ali Sabry, disepakati juga bahwa tidak akan dilakukan perekrutan lebih lanjut dari Sri Lanka," kata kementerian tersebut, seperti dimuat AFP.

Dikatakan bahwa Moskow akan menerima delegasi dari Sri Lanka pada 26 Juni mendatang untuk meninjau kembali masalah perekrutan tentara secara rinci dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasinya.

Ribuan warga Sri Lanka diduga telah direkrut oleh Rusia untuk menambah personel tentara yang berperang di Ukraina. Keluarga para tentara tersebut mendesak pemerintah Sri Lanka untuk segera memulangkan mereka, karena beberapa di antara mereka merupakan pensiunan tentara.

Sedikitnya 16 di antara mereka dilaporkan tewas dan 37 luka-luka selama terlibat perang Rusia, dan sekitar selusin lainnya dilaporkan ditahan sebagai tawanan perang di Ukraina. Ribuan tentara Rusia telah terbunuh di Ukraina sejak invasi dimulai lebih dari dua tahun lalu, dan Moskow

sedang melakukan upaya global untuk mendapatkan lebih banyak pasukan. Sri Lanka mengatakan banyak warga negaranya telah tertipu dan percaya bahwa mereka akan menerima gaji tinggi, tanah dan hak untuk menetap di Rusia sebagai imbalan atas tugas mereka di bidang non-tempur, namun akhirnya mereka dikirim ke garis depan.

Polisi di negara kepulauan tersebut telah menangkap dua pensiunan jenderal karena bertindak secara ilegal sebagai agen perekrutan untuk perusahaan tentara bayaran Rusia. Tentara dari negara tetangga Sri Lanka, seperti India dan Nepal, juga ikut serta dalam pertempuran tersebut, dan beberapa orang telah dipastikan tewas. ● ans



PASAR DOMBA DI KAIRO

Seorang pria dengan dombanya yang dijualnya di pasar domba menjelang Idul Adha mendatang di pinggiran Kairo, Mesir, Selasa (11/6).

Perahu Migran Tenggelam di Yaman, 39 Tewas dan 150 Hilang

SANAA (IM) - Sebuah kapal yang membawa lebih dari 200 migran tenggelam di lepas pantai Yaman. Sedikitnya 39 orang tewas dalam insiden terbaru di jalur migrasi berbahaya dari kawasan Afrika tersebut.

"Insiden tragis di lepas pantai Yaman. Kapal yang membawa 260 migran tenggelam kemarin (10/6). Sedikitnya 39 orang tewas, 150 orang lainnya hilang, 71 orang selamat," demikian pernyataan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (11/6).

Pernyataan IOM yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini tidak menyebut lebih spesifik soal asal kewarganegaraan para migran tersebut.

Setiap tahunnya, puluhan ribu migran dari Tanduk Afrika nekat melintasi perairan Laut Merah dalam upaya mencari negara-negara Teluk yang kaya minyak, untuk menghindari konflik, bencana alam, atau prospek ekonomi yang buruk.

Pada April lalu, dua kapal pengangkut migran tenggelam di lepas pantai Djibouti dalam waktu berselang dua pekan, yang menyebabkan kematian puluhan orang.

Pada saat itu, IOM mengatakan bahwa telah tercatat total 1.350 kematian di jalur migrasi berbahaya itu sejak tahun 2014 lalu. Angka itu belum termasuk insiden-insiden yang terjadi

sepanjang tahun ini.

Untuk tahun 2023 saja, IOM mencatat sedikitnya 698 kematian di rute migrasi berbahaya tersebut, termasuk 105 orang yang hilang di lautan.

IOM mengatakan pada Selasa (11/6) waktu setempat bahwa pihaknya "memberikan bantuan segera kepada para korban selamat".

Para migran yang berhasil mencapai wilayah Yaman seringkali menghadapi ancaman lebih lanjut terhadap keselamatan mereka. Negara termiskin di Semenanjung Arab ini terjerumus ke dalam perang sipil berkepanjangan yang berkecamuk selama satu dekade terakhir.

Banyak migran yang berusaha mencapai wilayah Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya agar bisa bekerja sebagai buruh atau pekerja rumah tangga.

Pada Agustus tahun lalu, Human Rights Watch (HRW) menuduh penjaga perbatasan Saudi membunuh "sedikitnya ratusan" warga Ethiopia yang berupaya melintasi perbatasan untuk masuk ke Saudi dari Yaman antara Maret 2022 hingga Juni 2023. Dalam beberapa kasus, sebut HRW, Saudi menggunakan senjata peledak.

Riyadh membantah tuduhan HRW tersebut, yang disebutnya "tidak berdasar dan tidak didasarkan pada sumber-sumber yang biasa dipercaya". ● tom

Arab Saudi Terbitkan Larangan Kerja di Luar Ruang saat Tengah Hari selama 3 Bulan

RIYADH (IM) - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan bekerja di luar ruangan saat tengah hari. Larangan tersebut berlaku selama tiga bulan dan mulai diterapkan pada akhir pekan ini.

Laman Alarabiyah pada Selasa (11/6) melansir, kebijakan itu diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para karyawan, khususnya mereka yang bekerja di luar ruangan. Semua pekerjaan yang mengharuskan berada di bawah sinar matahari akan ditangguhkan selama tiga jam setiap hari selama bulan-bulan musim panas di Arab Saudi.

Sesuai keputusan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (KSDMPS) Kerajaan Arab Saudi, terhitung mulai Sabtu (15/6) hingga Minggu, 15 September nanti, para pekerja akan dilarang bekerja di luar ruangan dari siang hingga pukul 15.00.

Pelanggaran terhadap keputusan tersebut dapat dilaporkan melalui nomor pengaduan terpadu 19911

atau melalui aplikasi seluler kementerian.

Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi menyatakan suhu rata-rata di seluruh Riyadh, mulai Sabtu pekan ini, akan mencapai 44 derajat Celsius. Suhu panas itu dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau keselamatan orang-orang jika terlalu lama terpapar sengatan matahari.

"Keputusan ini diambil dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan mereka yang bekerja di sektor swasta dan untuk mencegah segala sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan dan menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi mereka," ungkap KSDMPS Saudi dalam pernyataannya.

Untuk itu, para pemilik usaha diminta untuk mengubah jam kerja mereka dengan cara yang sesuai dengan keputusan pemerintah demi melindungi para karyawan dan mencegah insiden yang tidak diinginkan.

"Sekaligus memastikan peningkatan produktivitas," kata kementerian itu lagi. ● tom

Israel Tuding Hamas Tolak Proposal Gencatan Senjata Gaza yang Diusulkan Joe Biden

TEL AVIV (IM) - Hamas dilaporkan menolak proposal gencatan senjata Gaza yang telah digarisakan oleh Presiden AS Joe Biden. Hal itu dikatakan seorang pejabat Israel, tadi malam, setelah Tel Aviv menerima tanggapan dari kelompok pejuang Palestina melalui para mediator.

"Malam ini, Israel menerima, melalui para mediator, tanggapan Hamas. Sebagai tanggapannya, Hamas telah menolak proposal pembebasan tawanan yang diajukan oleh Presiden Biden," kata pejabat Israel yang tidak ingin disebutkan namanya itu, Selasa (11/6). "Mereka (Hamas) telah mengubah semua parameter utama dan paling berarti," kata pejabat itu.

Hamas pada Selasa secara resmi menanggapi usulan gencatan senjata AS untuk perang yang telah berlangsung selama delapan bulan di Jalur Gaza. Israel mengatakan tanggapan tersebut sama saja dengan penolakan.

Sementara seorang pejabat Hamas mengatakan pihaknya hanya mengulangi tuntutan lama yang belum dipenuhi oleh proposal yang

ada saat ini. Mesir dan Qatar mengatakan, mereka telah menerima tanggapan Hamas terhadap proposal yang digarisakan oleh Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei. Akan tetapi, mereka tidak mengungkapkan isinya.

Amerika Serikat mengklaim Israel telah menerima usulan Biden. Namun Israel belum secara terbuka menyatakan hal itu. Pada saat yang sama, militer Israel terus melakukan serangan di Jalur Gaza Tengah dan Selatan. Serangan zionis di dua kawasan itu bahkan termasuk yang paling berdarah dalam perang yang meletus pertama kali pada 7 Oktober 2023 itu.

Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan berkomitmen untuk mengakhiri perangnya di Gaza sebelum Hamas dilynapkan. Sebelumnya, seorang pejabat non-Israel yang memberikan penjelasan mengenai masalah ini, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan bahwa Hamas mengusulkan batas waktu baru untuk gencatan senjata permanen dengan Israel dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, termasuk Rafah. ● tom

Blinken Sebut Netanyahu Setujui Proposal Gencatan Senjata Biden

WASHINGTON (IM) - Proposal gencatan senjata yang digarisakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan lalu masih belum mendapat respon pasti dari Israel.

Kendati demikian, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken mengatakan dia telah mendengar sendiri dukungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terhadap proposal Biden selama pertemuan keduanya di Yerusalem.

Blinken menyebut Netanyahu telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung rencana gencatan senjata tiga fase tersebut.

"Saya bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu tadi malam dan dia menegaskan kembali komitmennya terhadap proposal tersebut," ujarnya, seperti dimuat AFP pada Selasa (11/6).

Komitmen itu menunjukkan harapan besar bagi perdamaian di Jalur Gaza. Tetapi menurut Blinken ini masih belum pasti, Israel dan Hamas masih harus memberikan keputusan resmi terkait proposal yang telah mendapat dukungan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB pekan ini.

"Pernyataan dari Israel dan dari kepemimpinan Hamas di Gaza itulah yang penting. Dan itulah yang tidak kami miliki. Kami menunggu jawaban dari Hamas," kata dia.

Blinken menilai Hamas mungkin menunggu keputusan pemimpinnya di Gaza, Yahya Sinwar, yang dituduh Israel sebagai dalang serangan 7 Oktober itu.

Sementara Israel juga belum mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah menerima proposal gencatan senjata yang diungkapkan Biden pada 31 Mei lalu.

Biden menyampaikan apa yang disebutnya sebagai rencana tiga fase Israel yang akan mengakhiri konflik, membebaskan semua sandera, dan mengarah pada rekonstruksi wilayah Palestina yang hancur tanpa kekuasaan Hamas.

Hamas pada Senin (10/6) menyambut baik keputusan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang mendukung rencana gencatan senjata.

Namun mereka bersikeras bahwa tuntutan mereka harus dipenuhi, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan total pasukan Israel dari wilayah tersebut, tetapi ditolak oleh Israel. ● tom